

Tanggap Darurat Diperpanjang, Sleman Siapkan Dana Rp 32 M

SLEMAN (KR) - Pemkab Sleman memperpanjang status tanggap darurat hingga 31 Desember. Hal ini dengan pertimbangan pandemi Covid-19 hingga Siaga Merapi. Untuk penanganannya, Pemkab Sleman menyiapkan anggaran hingga Rp 32 miliar.

Sekda Sleman Harda Kiswaya memastikan dana Rp 32 miliar ini sangat cukup untuk menangani status tanggap bencana di Sleman. Apalagi bantuan dari luar juga terus mengalir. Misalnya untuk harian, sayuran segar juga terus tersedia. Dalam penanganan status Gunung Merapi, Pemkab Sleman juga telah melakukan upaya tersendiri, khususnya yang ber-

kaitan dengan pengungsian. "Kita siapkan daerah yang kemungkinan nanti ada peningkatan ekskalasi. Selain persiapan barak di seluruh Cangkringan, Pemkab Sleman juga akan menambah ke wilayah Pakem dan Turi," kata Harda saat ditemui wartawan, Selasa (1/12). Harda mengatakan, warga di Pakem dan Turi bahkan secara swadaya

telah mempersiapkan barak yang ada. Mulai dari tempat tidur hingga kamar mandi. Dalam pekan ini, barak di Cangkringan akan diselesaikan. "Saya sudah tinjau barak di Wonokerto dan sudah disiapkan. Kesadaran masyarakat sudah baik," tandasnya. Harda menegaskan, pengungsi di barak perlu memperhatikan kebersihan lingkungan. Karena dari beberapa kali meninjau, masih ditemukan sampah berserakan. Selain itu pengungsi juga terus menjaga kedisiplinan masker dan jaga jarak masih kurang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Sleman, Joko Supriyanto menambahkan, untuk mengantisipasi apabila skala ancaman

naik menjadi Awas, disiapkan empat barak lainnya yakni di Gayam, Kepuharjo dan Koripan. "Karena war-

ga di Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan Srunen saat mengungsi arahnya kan tidak boleh melompati

sungai. Namun harus ke bawah. Jadi 4 barak itu yang disiapkan," ungkap-nya. **(Aha)-f**

DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI

BRI Sleman Serahkan Bantuan Pengerasan Aspal Jalan

SLEMAN (KR) - Bank BRI Kantor Cabang Sleman menyerahkan bantuan pengerasan aspal jalan di Dusun Nambongan Tlogoadi Mlati dan Barak I Margoluwih Seyegan, Senin (30/11) malam. Bantuan itu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kedua dusun.

Pemimpin Cabang BRI Sleman Totok Siswanto menjelaskan, pemberian bantuan pengerasan aspal jalan ini merupakan program 'Corporate Social Responsibility (CSR)' dari BRI. Untuk Dusun Nambongan bantuan yang diberikan Rp 148.380.000 dan Dusun Barak I sebesar Rp 201.030.000. "Tujuan pengerasan aspal jalan ini supaya transportasi lancar untuk mendukung sektor UMKM sehingga ekonomi di kedua dusun menjadi tumbuh," jelasnya.

Untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat Nambongan, Barak I dan sekitarnya, BRI Kantor Cabang Sleman juga menyalurkan kredit Kupedes Cepat (Kece) dengan maksimal Rp 5 juta tanpa agunan dengan pola angsuran mingguan, Kupedes Bangkit dengan plafon maksimal Rp 20 juta. Kemudian super mikro plafon maksimal Rp 10 juta



KR-Saifullah Nur Ichwan

Totok saat memberikan sambutan dalam penyerahan bantuan pengerasan aspal jalan di Dusun Barak I.

dan angsurannya mulai Januari 2021. Selain itu juga KUR mikro sampai dengan Rp 50 juta, Kupedes sampai Rp 250 juta dan KUR ritel sampai Rp 500 juta. "Penyaluran kredit ini untuk mendukung ekonomi masyarakat. Soalnya di Dusun Nambongan terdapat potensi usaha perajin bambu dan Barak I perajin batu bata serta perajin besi las," terangnya.

Selain itu, bagi masyarakat juga diberi kesempatan untuk menjadi agen Brilink. Dimana masyarakat bisa bertindak sebagai kepanjangan BRI dalam melakukan layanan perbankan pada umumnya. "Di agen Brilink itu, masyarakat bisa menabung, membayar angsuran, bayar listrik

dan lainnya. Kemudian agen Brilink akan mendapat profit dari BRI dan nasabah. Bagi yang minat menjadi agen Brilink, bisa menghubungi BRI terdekat," paparnya.

Lebih lanjut dikatakan Totok, pemberian CSR ini merupakan amanat Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Di mana setiap perusahaan wajib menyisihkan keuntungannya untuk dikembalikan ke masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. "Kami tidak hanya menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Namun keuntungan BRI disisihkan untuk diberikan kepada masyarakat melalui CSR. Hal itu bisa

berwujud bantuan pendidikan, pengerasan aspal jalan, rehab tempat ibadah dan lainnya," katanya.

Selama tahun 2020, Kantor Cabang BRI telah menyalurkan CSR 8 kali senilai Rp 1,3 miliar di antaranya penyaluran 2 ambulans ke Yayasan Islam Kalimasada dan Yonif 403/WP, tanggap darurat wastafel cuci tangan. Kemudian tanggap darurat peralatan kesehatan berupa APD, masker N95 dan lainnya untuk RSUD Sleman, tanggap darurat bantuan sembako di Ngaglik dan PAUD Kuncup Mekar Berseri. "Sedangkan yang masih dalam proses adalah renovasi Masjid Al Muhtadin Desa Triharjo, sarana e-tang dan 500 thermogun di wilayah Sleman," katanya.

Di samping itu, BRI Sleman juga mempunyai program Link Aja Masjid. Dimana penyaluran dana infaq masyarakat bisa melalui aplikasi Link Aja sehingga dana infaq langsung masuk ke rekening masjid tersebut. "Ini untuk mencegah mencurian kotak infaq di masjid. Selain itu, juga memudahkan menghitung jumlah infaq yang masuk karena langsung masuk ke rekening masjid," tutup Totok. **(Sni)-f**

Bupati Bagikan Kendaraan Dinas



KR-Istimewa

Bupati mencoba naik kendaraan dinas yang dibagikan.

SLEMAN (KR) - Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemkab Sleman membagikan 27 unit kendaraan roda dua kepada sejumlah instansi. Pembagian dilakukan Bupati Sri Purnomo di Pendapa Parasamya Setda Sleman, Selasa (1/12).

Menurut Bupati, pada hakikatnya kendaraan operasional roda dua ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sehingga diharapkan kendaraan dinas ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kepen-

tingan masyarakat. "Semua kendaraan dinas ini, dan semua fasilitas yang kita terima pada dasarnya berasal dari masyarakat," jelasnya.

Sementara Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Haris Sutarta menyebut, motor yang dibagikan tersebut berjenis Kawasaki KLX 150 G. Sebanyak 27 motor dibagikan kepada 17 kapalewon, 8 unit untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), 1 unit untuk Bagian Perekonomian Setda Sleman dan 1 unit untuk Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

"Pengadaan kendaraan dinas atau operasional tersebut senilai Rp 912.025.000," ungkapnya. **(Has)-f**

Dua KPPS di Prambanan Positif Covid-19

SLEMAN (KR) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman mengadakan rapid test bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas ketertiban di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari 19.125 orang KPPS dan petugas ketertiban, ada dua orang yang dinyatakan positif. Selanjutnya dua petugas yang dinyatakan positif diminta tidak mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan lain sebagainya.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi menerangkan, untuk memastikan KPPS dan petugas ketertiban bebas dari Covid-19, pihaknya memang melakukan rapid test bagi seluruh petugas yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada 9 Desember. "Hasil rapid test ada yang reaktif dan

langsung ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas. Hasil swab, ada dua yang positif dari Kapanewon Prambanan," katanya pada acara Bakti Sosial Polda DIY dan Petrokimia Gresik di Balai Kalurahan Caturharjo Sleman, Senin (30/11).

Menurut Trapsi, dua orang yang dinyatakan positif langsung dilakukan pengantian karena yang bersangkutan harus menjalani perawatan medis. Meski ada yang positif Covid-19, namun jumlahnya sangat kecil dan hal ini tidak mengganggu tahapan Pilkada. "Untuk memberikan rasa aman bagi pemilih, saat pelaksanaan Pilkada, kami juga menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk KPPS dan petugas ketertiban yang ada," imbuhnya. **(Aha/Ayu)-f**



KR-Istimewa

Totok menyerahkan bantuan pengerasan aspal jalan di Dusun Nambongan.



KR-Saifullah Nur Ichwan

Totok menyerahkan bantuan pengerasan aspal jalan di Dusun Barak I.

LAPORAN PANSUS III DPRD KABUPATEN SLEMAN

Kalurahan Wajib Bentuk dan Fasilitasi Satlakar

SLEMAN (KR) - Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, masing-masing kalurahan nantinya diwajibkan membentuk dan memfasilitasi Satuan Sukarelawan Pemadam Kebakaran (Satlakar). Tujuannya untuk mempercepat penanganan dan mencegah kerugian yang besar akibat kebakaran.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Sleman Ani Martanti ST menjelaskan, raperda tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran menjadikan prioritas untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dalam raperda itu mengamanatkan, setiap desa wajib membentuk dan memfasilitasi Satlakar. "Jadi setiap kalurahan wajib satlakar dengan melibatkan komponen masyarakat. Tak hanya itu, kalurahan juga wajib memfasilitasi Satlakar melalui APBDes," jelas Ani.

Tujuan dibentuknya Satlakar ini untuk mempercepat penanganan kebakaran di masing-masing wilayah. Selain juga untuk meminimalisasi kerugian maupun korban akibat musibah kebakaran. "Harapan kami, ketika terjadi kebakaran, Satlakar di masing-masing kalurahan bisa bergerak cepat dulu. Tanpa harus menunggu tim pemadam kebakaran dari kabupaten se-

hingga akan lebih cepat," terangnya.

Menurutnya, kejadian kebakaran yang terjadi selama ini banyak yang disebabkan korsleting listrik. Hal itu dikarenakan komponen instalasi listrik yang digunakan belum standar. "Jadi nanti setiap orang, lembaga/instansi dalam perencanaan pembangunan dipersyaratkan komponen instalasi listrik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal itu sebagai upaya pencegahan kebakaran," paparnya.

Dalam raperda ini nantinya juga akan ada pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi setiap orang yang menghalangi-halangi petugas saat proses penanggulangan kebakaran. Bahkan termasuk penelpon gelap yang sering mengganggu petugas tim kebakaran.

"Jadi nanti kalau ada yang menghalangi maupun penelpon gelap, dalam perda ini mengatur sanksinya. Bahkan bisa dipidanakan juga," tegasnya.

Setelah Raperda ditetapkan, eksekutif perlu menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait teknis pelaksanaan peraturan daerah (perda) tersebut. Untuk penyusunan Perbup, DPRD perlu dilibatkan dalam pembahasan. "Kami minta penerbitan Perbup itu maksimal 6 bulan setelah raperda ini ditetapkan menjadi perda," tutup Ani. **(Sni)-f**



KR-Saifullah Nur Ichwan

Pansus III DPRD Kabupaten Sleman saat rapat kerja dengan eksekutif untuk membahas raperda.

LAPORAN PANSUS IV DPRD KABUPATEN SLEMAN

Melindungi Investor Lama, Memudahkan Investor Baru

SLEMAN (KR) - Kehadiran Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diharapkan tidak hanya memberikan kemudahan bagi investor baru. Namun juga untuk melindungi investor lama dan UMKM yang sudah ada di Kabupaten Sleman.

Ketua Pansus IV Hj Sumaryatin SSos MA mengatakan, masuknya investor di kabupaten harus dapat menurunkan angka kemiskinan dan gini ratio. Raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi itu mewujudkan hal itu. "Tujuan raperda ini untuk memudahkan investor masuk di Kabupaten Sleman. Dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan dan gini ratio," katanya.

Meskipun demikian, kemudahan investasi ini bukan berarti kanibalisme dalam usaha. Namun pemerintah daerah harus melindungi terhadap investor dan pelaku UMKM yang sudah ada di Kabupaten Sleman. "Kran investor baru boleh saja dibuka dengan cara kemudahan berinvestasi. Tapi yang tak boleh dilupakan, bagaimana pemerintah daerah tetap melindungi investor lama dan pelaku UMKM," tegas perempuan yang kerap dipanggil Atin ini.

Kemudahan untuk berinvestasi ini tidak hanya un-

tuk kalangan investor besar saja. Namun pemerintah daerah harus memastikan kemudahan investasi bagi seluruh level usaha. "Jadi semua level usaha dipastikan terlayani kemudahannya. Tidak hanya usaha besar," pinta politisi dari PKS ini.

Kehadiran investor di Kabupaten Sleman, diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Untuk itu, perlu ada regulasi atau kepastian bahwa investor yang ada di Kabupaten Sleman harus dapat menyerap tenaga lokal. "Jadi tak hanya memberikan kemudahan dalam izin. Tapi harus ada kepastian tentang penyerapan tenaga lokal dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran di Sleman," ucapnya.

Di samping itu, *sharing economy* pola kemitraan yang saling menguntungkan antara investor dengan UMKM lokal Sleman. Mengingat tidak zaman lagi usaha hanya membesarkan yang besar, tanpa bersinergi dan berkolaborasi dengan usaha mikro menengah yang sudah ada di Sleman. "Harmoni inilah yang harus diberikan terobosan oleh Pemda agar pola kemitraan tidak hanya formalitas. Tetapi benar-benar menguatkan dan menumbuhkan sebagai bagian dari konsep ekonomi berbagi dan ekonomi yang saling dukung," pungkasnya. **(Sni)-f**



KR-Istimewa

Atin saat memimpin rapat dengan eksekutif.